

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengambil simpulan yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam memberikan izin investasi di Wilayah Sarbagita yakni Melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. Melalui peraturan ini, Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal yang ingin melaksanakan investasi di Provinsi Bali dengan memberikan fasilitas berupa penyediaan data dan informasi, pengurangan retribusi, penyederhanaan dan pemberian perizinan, dan lainnya. Pasca adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk meningkatkan investasi, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum membuat kebijakan baru mengenai hal tersebut.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali cukup meningkatkan realisasi investasi di Wilayah Sarbagita terutama pada Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar Akan tetapi pada tahun 2020 realisasi investasi di Wilayah Sarbagita menurun dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga menyulitkan segala implementasi investasi yang akan dilaksanakan di wilayah Sarbagita.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran yakni sebagai berikut.

1. Perlu adanya sosialisasi kebijakan terkait kemudahan investasi dari Pemerintah Provinsi Bali yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan adanya OSS (*Online Single Submission*) maupun e-perizinan.
2. Perlu adanya kegiatan *expo* mengenai sumber daya alam, budaya, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali guna menarik minat investor dan wisatawan.
3. Perlu adanya penyesuaian kebijakan di level daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali guna memudahkan investasi di Provinsi Bali khususnya kawasan metropolitan Sarbagita sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. Perlu adanya pengembangan sektor lapangan usaha khususnya lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebagai upaya peningkatan PDRB di Provinsi Bali.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Adrian Sutedi, 2010, *Dinamika Perizinan Dan Good Governance*,
Madju Bersama, Medan

Eduardus Tandelilin, 2017, *Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi.*, PT Kanisus, Yogyakarta

Hayat, dkk. 2018, *Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro.*, Prenamedia Group, Jakarta

Jonker Sihombing, 2008, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Penerbit PT. Alumni, Bandung,

Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta., Bandung

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

N. Rosyidah Rahmawati, 2004, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, Penerbit Bayumedia, Malang

N.H.T. Siahaan., 2009, *Hukum Lingkungan, Pancuran Alam*, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.

Philipus M Hadjon., 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika
Surabaya

Siti Anisah, Lucky Suryo Wicaksono, 2017, *Hukum Investasi.*, FH
UII Press, Yogyakarta

Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum
Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika,
Surabaya

Vera Rimbawani Sushanty, 2020, *Hukum Perijinan*, Ubhara Press,
Surabaya

W.F. Prins dan R, Kosim Adisapoetra, 1978, *Pengantar Ilmu
Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*,
Grasindo, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2007 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2015 dan
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran
Negara Nomor 63 Tahun 2019 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6330)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 2021 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6617)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran
Negara Nomor 16 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6618)

Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan
Tabanan (Lembaran Negara Nomor 121 Tahun 2014)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada
Masyarakat dan/atau Penanam Modal (Lembaran Daerah

Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 dan Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3)

3. Jurnal

Amalia Nuril Hidayati, 2017, “Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam“, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol-VIII/No-02/Juni/2017, Universitas Yudharta Pasuruan

Ardika Nurfurqan, 2020, “Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Coovid-19: Perspektif Hukum Administrasi”, *Jurnal Yustika*, Vol-XXIII/No-01/Juli/2020, Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

Chandra Kurniawan, 2016, “Pengaruh Investasi Terhadap Perekonomian Internasional”, *Jurnal Media Wahanan Ekonomika*, vol. 12/No-04/Januari/2016.

Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti

Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-VIII/No-01/Januari-Maret/2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Fathoni, S. Tisnanta, 2018, “Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi Di Provinsi Lampung”, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 01/No-01/Maret, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Febri Rizki Kurniawan, 2019, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Terhadap Investasi Asing Bidang Pariwisata”, *Jurnal Hasil Penelitian*, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Helmi, “Kedudukan Izin Lingkuhan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-II/No-02,

Puji Hardati, 2016, “Hierarki Pusat Pelayanan Di Kecamatan Ungaran Barat Dan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”, *Jurnal Geografi*, Vol-XIII/No-02/Juli/2016, Universitas Negeri Semarang.

Siti Nurchalizah, Sri Ernawati, 2021, “Standar Operasional Proseedur (SOP) Izin Investasi Dalam Meningkatkan Minat Investor Di Kota Depok”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 26/N0-01/Maret, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima.

4. Internet

Agusiyah Siti Nurfateha, “Pengaruh Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha di Indonesia Terhadap Daya Tarik Investor,

https://www.researchgate.net/publication/336741786_PENGARUH_KEBIJAKAN_PELAYANAN_PERIZINAN_USAHA_DI_INDONESIA_TERHADAP_DAYA_TARIK_INVESTOR, diakses 20 September 2021 pada pukul

16.00 WITA

http://dpmptsp.baliprov.go.id/berita/berita_detail/41 diakses pada 6 November 2021 pada pukul 01.07 WITA

<https://kbbi.web.id/wilayah> diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 21.00 WITA

<https://pemerintah.net/kabupaten-kota-di-provinsi-bali/> diakses pada 26 September 2021 pada pukul 01.30 WITA

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/investasi> diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 21.30 WITA

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/izin> diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 21.45 WITA

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/13307/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/0/berita> diakses pada 5 November 2021 pada pukul 01.01 WITA

<https://www.suara.com/news/2020/12/10/143553/34-daftar->

[provinsi-di-indonesia-dari-aceh-hingga-papua](#) diakses

pada 26 September pada pukul 00.36 WITA

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik

Indonesia, Pedoman Perizinan Berushaa Melalui Sistem

OSS, hlm. 3 diakses pada

<http://sppk.kemendag.go.id/files/pedoman-oss.pdf>

Kementrian Investasi/BKPM,

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran->

[pers/readmore/2420901/71101](#) diakses pada 1 Oktober

pada pukul 23.59 WITA

NiNyoman Wira Widyanti, 2021,

<https://travel.kompas.com/read/2021/06/10/114750627/ba>

[li-jadi-destinasi-wisata-terpopuler-di-dunia-dan-asia-](#)

[tahun-2021?page=all](#) diakses pada 5 November 2021 pada

pukul 20.14 WITA

Kementrian Investasi/BKPM,

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran->

[pers/readmore/2431101/73101](#) diakses pada 19 November

2021 pukul 23.00 WITA